

DRAFT NASKAH BUKU

QUO VADIS BRIMOB POLRI?

Oleh:
Muradi

BANDUNG
November 2009

KATA PENGANTAR PENULIS

Buku ditangan anda yang berjudul *Quo Vadis Brimob Polri?* ini merupakan kumpulan artikel dan makalah penulis, serta thesis master penulis yang telah diterbitkan dan dipresentasikan terkait dengan kinerja Polri sepanjang sepuluh tahun pasca pemisahan dari TNI, lebih khusus lagi terhadap kinerja Brigade Mobile (Brimob) Polri, sebagai unit polisi paramiliter yang khas. Brimob Polri sebagai unit khusus di Polri harus diakui mendapatkan banyak sorotan dan kritikan masyarakat terkait dengan peran dan fungsinya khusus pada pemulihan keamanan di daerah konflik yang cenderung menggunakan pendekatan kekerasan dan penegakan hukum. Meski demikian, tidak sedikit yang memberikan apresiasi terhadap kinerja Korps Baret Biru ini. Pro dan kontra terkait dengan kinerja Brimob Polri menjadi bagian yang menarik untuk dikaji, meski secara umum penulis memiliki asumsi dasar bahwa pro dan kontra tersebut salah satunya dikarenakan minimnya literature terkait dengan Brimob Polri khususnya, dan Polri umumnya. Sehingga publik beranggapan bahwa tugas-tugas Brimob Polri sama dengan unit lainnya yang ada dikepolisian. Anggapan tersebut tidak sepenuhnya salah, sebab secara kasat mata hampir tidak ada yang membedakan antara personel Brimob dengan personel polisi dari unit lainnya, kecuali seragam operasionalnya. Indikasi yang paling mencolok dalam konteks tersebut adalah apresiasi yang tinggi pengunjung blog penulis: www.muradi.wordpress.com, yang banyak memuat artikel, makalah, dan paper terkait dengan isu-isu politik dan keamanan, khususnya terkait dengan Polri dan Brimob. Adalah bukan suatu kebetulan bila kemudian buku yang ada di tangan anda ini isinya juga dapat ditemukan di dalam blog tersebut, meski khusus untuk penerbitan buku ini penulis banyak menambahkan berbagai literature dan pemutakhiran data agar buku ini dapat menjadi rujukan kontemporer.

Penerbitan buku ini salah satunya juga didorong oleh permintaan pengunjung blog penulis yang berisikan tentang artikel-artikel dan makalah-makalah terkait dengan tema dan isu kepolisian. Banyak pengunjung blog penulis mengeluhkan masih sedikitnya literatur terkait dengan masalah kepolisian, dan Brimob khususnya. Jikapun ada lebih banyak mencerminkan pendapat kelembagaan. Sehingga, masyarakat tidak mendapatkan konteks yang utuh terkait dengan permasalahan dan literatur tentang kepolisian dan permasalahannya. Hal yang lebih menarik lagi adalah di kalangan internal Polri dan khususnya Brimob pun masih sangat membutuhkan literatur dan pandangan-pandangan terkait dengan permasalahan kepolisian, dan unit polisi paramiliter baik dalam konteks akademik maupun operasional. Sehingga kehadiran buku ini diharapkan dapat menjadi penambah wawasan dan literatur tentang berbagai hal yang telah dan akan dilakukan oleh Brimob Polri dalam merespon berbagai harapan dan tuntutan kepada Polri dan Brimob khususnya terkait dengan profesionalisme dan pencerminan Brimob sebagai bagian terintegral dari Polri.

Buku yang berada ditangan anda ini bisa dibilang sebagai hasil dari suatu proses penelitian, dan pengamatan panjang penulis terkait dengan isu kepolisian, dan polisi paramiliter unit khususnya, serta permasalahannya. Hal yang menarik adalah karena ruang seharusnya diisi oleh kalangan akademik dan intelektual untuk mengkritisi berbagai kebijakan dan perilaku yang tidak seirama dengan perpolisian demokratik dibiarkan kosong. Sehingga, kehadiran buku ini diharapkan menjadi pengisi kekosongan bagi pengkritisan kinerja Polri dan Brimob agar lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Buku ini secara gamblang membangun paradigma teoretik dengan mengambil contoh permasalahan secara empirik terkait dengan kinerja Brimob Polri. Sehingga apabila pembahasan dari buku ini terasa bersuara keras dalam mengkritisi kebijakan Polri terkait dengan Brimob maupun penyimpangan perilaku yang dilakukan oknum anggota, hal itu semata-mata untuk mempertajam analisis dan mempertegas komitmen penulis yang terus mendamba agar Brimob Polri menjadi institusi keamanan yang profesional dalam ruang perpolisian demokratik. Tak heran pula apabila halaman demi halaman, berisi kritikan yang tajam, tegas, dan keras namun tetap konstruktif. Hal ini karena penulis berupaya melihatnya dari perspektif akademik dan masyarakat sipil terkait dengan langkah-langkah yang diambil pimpinan Polri terhadap Brimob terkait dengan tuntutan masyarakat terhadap kinerja Korp Baret Biru tersebut.

Dalam buku ini juga ditawarkan berbagai konsep dan format berkaitan dengan pengembangan organisasi Brimob serta bagaimana response Brimob terhadap tuntutan perbaikan kinerja Brimob agar seirama dengan Polri sebagai induk dari Brimob. Bagaimana pola pendekatan yang dilakukan oleh personil Brimob dalam penegakan hukum di daerah konflik atau pasca konflik agar tidak makin membuat masyarakat pasca konflik menjadi makin trauma dengan kekerasan. Bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan oleh internal Brimob dalam memilah mana kultur militeristik dengan pendekatan militeristik dalam operasional. Meski Brimob sebagai unit polisi paramiliter, bukan berarti pendekatan militeristik yang selalu dikedepankan dalam menjalankan tugasnya. Sebagai unit yang bertanggung jawab dalam ancaman keamanan tingkat tinggi dan penegakan hukum. Keberadaan Brimob yang berada di wilayah abu-abu antara perpolisian demokratik yang sipil dengan kultur militeristik menjadi tantangan tersendiri bagi internal Brimob dan Pimpinan Polri dalam mengintegrasikan keduanya seirama, dan tidak saling menegasikan.

Dalam konteks meningkatkan kesejahteraan anggota Brimob, penulis menawarkan beberapa solusi agar permasalahan tersebut terpecahkan dan tidak menjadi 'duri dalam daging' di masa depan. Dalam konteks perluasan peran dan fungsi Brimob di masa depan, penulis menawarkan solusi penambahan secara bertahap personil Brimob hingga mencapai 10 % dari jumlah total anggota Polri, di sertai perluasan struktur komando yang tidak lagi terlalu terpusat dengan mengakusisi Polair serta menjaga perbatasan antar negara.

Meski begitu perlu ditegaskan bahwa inti dari buku ini sesungguhnya terletak pada pengamatan dan tawaran solutif dari penulis terkait dengan kinerja Brimob dalam mengiringi perjalanan Polri. Kekuatan dari buku ini tak lepas dari keberanian penulis membangun paradigma yang berbeda dengan arus yang ada. Pengambilan posisi penulis yang berbeda dengan para akademisi atau pengamat kepolisian lainnya, bertujuan agar penulis tetap mampu membangun antithesis dari permasalahan yang terkait dengan kinerja Brimob dan Reformasi Polri umumnya.

Dan secara sadar pula penulis mengakui bahwa buku ini jauh dari kata ideal. Sehingga masih perlu buku-buku atau tulisan pembanding, yang diharapkan lahir dari stimulasi terbitnya buku ini. Sehingga akan mampu membawa penulis untuk selalu memperbaiki diri secara gradual. Dengan demikian akan lahir pergulatan wacana yang lebih mampu menjawab semua permasalahan yang menghambat proses perbaikan dan penguatan kelembagaan Polri dalam bingkai perpolisian demokratik yang professional dan mandiri.

Penulis mengakui banyak pihak yang terlibat dalam penerbitan buku ini, baik sebagai pembaca yang memberikan banyak masukan, kritik, saran, dan gugatan terkait dengan isi dari sebagian naskah buku ini, terutama para pengunjung setia blog penulis; www.muradi.wordpress.com. Penulis juga mengucapkan terima kasih penerbit Pustaka Sutra yang telah bersedia menerbitkan naskah ini menjadi sebuah buku; Prof. Dr. Nasrullah Natzir, dan kolega penulis di Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP UNPAD, Bandung; Prof. Dr. Yahya Muhamin, yang banyak mendukung dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengaktualisasikan diri di Universitas Al Azhar Indonesia, juga rekan-rekan pengajar di Jurusan Hubungan Internasional FISIP Al Azhar Indonesia, Jakarta; rekan-rekan pengajar di Departemen Hubungan Internasional Universitas Paramadina; Awang Munawar dan rekan-rekan pengajar di Jurusan Hubungan Internasional FISIP, UNPAS Bandung; Prof. Leonard C. Sebastian, dari Indonesia Programme, Institute Defense and Strategic Studies, S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapura; Prof. Anton Lucas dan Dr. Jim Schillers dari Flinders Asia Center, School of Politics and International Studies, Flinders University, Australia, yang menjadi Pembimbing Utama Penulis; Dr. Priyambudi Sulistiyanto, Ketua Jurusan Asian Studies Flinders University, yang banyak menjadi teman diskusi terkait studi penulis; Prof. Himendra Wargahadibrata yang banyak memotivasi penulis selama menjadi mahasiswa di Unpad serta mengabdikan pada almamater tercinta; Dr. Gugun Gunardi, yang banyak memberikan perspektif yang mencerahkan dalam menjalani hidup; Bunda Nanny Zainudin, teman diskusi sekaligus orang tua yang banyak memberikan berbagai pemahaman dan realitas dalam menghadapi hidup; Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Andi Widjajanto, atas masukan dan kritiknya terhadap draft buku, khususnya thesis penulis yang merupakan bagian dari buku ini.

Terakhir penulis sampaikan terima kasih kepada orang tua, ayah penulis yang tiada pernah berhenti berdoa dan mendorong agar penulis terus aktif memberikan kontribusi bagi kebaikan dan kebesaran bangsa, dan masyarakatnya; Almarhumah Ibu penulis yang selalu memberikan inspirasi dengan falsafah hidup yang membuat hidup ini menjadi sangat berarti. Wafatnya beliau telah membuat penulis makin menyadari akan berharganya hakikat hidup dan kehidupan; Kepada Almarhum adik penulis tercinta, Sardi yang mengajarkan begitu berartinya hidup, serta semangat hidup yang luar biasa dalam melawan penyakit yang diderita hingga Allah SWT memanggil untuk selamanya. Atas semua itu penulis mengucapkan terimakasih atas semua pelajaran berharga tersebut.

Kepada keluarga penulis; Alia Maharani, isteri dan kedua anak penulis; Gadis dan Alvaro. Dan buku ini didedikasikan untuk mereka, karena kesabaran dan dukungan yang tak kenal henti kepada penulis sehingga naskah ini menjadi sebuah buku. Semoga saja buku ini bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Bandung, November 2009

Muradi

Muradi adalah Dosen Tetap Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran (UNPAD), Bandung. Ia juga aktif mengajar di Departemen Hubungan Internasional, Universitas Paramadina, Jurusan Hubungan Internasional FISIP Al Azhar, Jakarta, dan Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Pasundan (UNPAS), Bandung. Mata kuliah yang diajarkannya adalah: Sistem Politik Indonesia, Kajian Stratejik, Politik Pertahanan dan Keamanan, Militer dan Politik, dan Isu-isu Global Kontemporer.

Aktivitas lainnya adalah mengajar pada Sekolah Staf dan Komando Angkatan TNI Angkatan Udara (SESKOAU), Lembang Bandung; menjadi Konsultan Penelitian pada Sekolah Staf dan Pimpinan (SESPIM) POLRI; Redaktur Ahli pada Jurnal "Sanyata Sumanasa Wira" SESPIM POLRI, dan Redaktur Ahli Jurnal Keamanan "Security Journal", Jakarta. Ia pernah menjadi peneliti dan Direktur Program The RIDEP Institute, Jakarta. Selain sebagai salah satu pendiri, ia juga menjadi Direktur Eksekutif Pusat Studi Pertahanan dan Perdamaian (PSPP) Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta; pada Pusat Studi Keamanan Nasional, Universitas Padjadjaran (PSKN UNPAD), Bandung ia menjabat sebagai Wakil Ketua.

Banyak mengkaji dan menulis tentang kajian kepolisian, dan militer di berbagai surat kabar, majalah, serta jurnal baik nasional maupun internasional, diantaranya Jurnal *Analisis* CSIS Jakarta; Jurnal *Pacis* Universitas Parahyangan, Bandung; Journal Universitas Paramadina; Jakarta; Jurnal *Mundial*, Universitas Al Azhar Jakarta, Jurnal *Governance* Universitas Padjadjaran, Jurnal *Sanyata Sumanasa Wira*, SESPIM POLRI, *Commentaries* RSIS NTU, Singapore, *Australian Defence Journal*, *Police Quarterly*, *Journal of Contemporary Asia*, *Journal of Politics and Law*, dan lain sebagainya. Beberapa buku terkait dengan kepolisian, dan militer juga telah diterbitkan, baik sebagai penulis maupun kontributor.

Penulis memperoleh gelar kesarjanaaan dari Jurusan Sejarah UNPAD (2000) dengan skripsi berjudul *Perbandingan Pemikiran Politik Sutan Sjahrir dan Tan Malaka tentang Konsep Negara* telah diterbitkan oleh CEDess (2003), kemudian Magister Ilmu Politik (M.Si) FISIP UI (2003), dengan judul Tesis *Perubahan Sikap Politik TNI pasca Soeharto* telah diterbitkan oleh UNPADPress (2004), dan Master Kajian Stratejik (MSc) dari S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University (NTU), Singapura (2008) dengan Thesis berjudul: *The Reform of Mobile Brigade of Indonesian National Police and Democratization*, yang menjadi bagian terpenting dari pembahasan buku yang anda pegang ini. Sementara ini penulis tengah menyelesaikan Program Doktor(PhD) Ilmu Politik pada *School of Political & International Studies*, Flinders University, Adelaide, Australia, dengan penelitian berjudul: *The Empowerment of the Police in Post Soeharto Era*. Muradi dapat dihubungi melalui pos elektronik: muradi_clark@unpad.ac.id atau lamannya: www.muradi.wordpress.com.

QUO VADIS BRIMOB POLRI?*

Sebagai salah satu unit tertua di lingkungan Polri, Brigade Mobil (Brimob) mengalami fase stagnasi dan ketidakjelasan arah pengembangan organisasi. Hal ini tercermin dari tidak fokusnya pimpinan Polri terkait dengan pembangunan institusi Brimob sebagai satuan elit Polri. Dengan peran dan fungsi yang lebih spesifik dan fokus pada gangguan Kamtibmas berkadar tinggi, dan satuan pemukul pamungkas dengan kemampuan setara dengan unit khusus lainnya, seharusnya Brimob ditempatkan lebih baik kondisinya dibandingkan saat ini. Ketidakfokusan pimpinan Polri terhadap pengembangan Brimob tersebut makin dipertegas dengan lahirnya unit khusus anti terror, Detasemen Khusus 88 Anti Teror, Densus 88 AT. Pasca Densus 88 AT berdiri, Brimob kehilangan orientasinya dalam mengembangkan organisasi dan SDM-nya.

Efek langsung dari keberadaan Densus 88 AT adalah makin sempitnya ruang gerak Brimob dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai unit khusus Polri. Apalagi ketika Densus 88 AT mulai dikembangkan di seluruh Polda. Densus 88 AT yang berada di bawah Bareskrim makin leluasa melakukan kerja-kerja gangguan Kamtibmas tingkat tinggi karena memiliki wewenang sama dengan anggota Polri yang berada di unit Reskrim. Pada beberapa kasus penanganan pembalakan liar di Riau dan Kalimantan Barat, Densus 88 AT bersama Reskrim Polda setempat harus 'bersaing' dengan Brimob yang juga memiliki tugas dan wewenang yang sama terkait dengan perburuan pelaku pembalakan liar tersebut

Masalah lain yang kemudian mengemuka adalah terjadinya unjuk rasa oleh puluhan anggota Brimob Polda Sulawesi Selatan terkait dengan tidak kunjung cairnya Sisa Hasil Usaha (SHU) dari koperasi di lingkungan Polda Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu. Pencairan SHU koperasi tersebut sesungguhnya mencerminkan bahwa masalah kesejahteraan menjadi problem laten bagi anggota Polri di lingkungan Brimob. Belum lagi anggota Brimob dihadapkan pada realitas bahwa kesatuan tersebut sangat jauh dari akses ekonomi. Berbeda dengan unit-unit lain yang ada di Polri, yang relatif masih memiliki akses ekonomi 'non formal' untuk menutupi keterbatasan pendapatan yang diterima diluar gaji dan tunjangan. Sebagaimana diketahui unit-unit lain yang ada di lingkungan Polri seperti Lantas, Reskrim, Intelkam, ataupun Samapta cenderung mengandalkan pemasukan 'non formal' diluar gaji yang jauh dari cukup. Apalagi pada kenyataannya anggota Brimob juga dipisahkan dari unit lainnya dan jauh dari pusat kota, hal ini makin membuat frustrasi anggota Brimob disebabkan oleh keterbatasan-keterbatasan.

Harus diakui bahwa perhatian dan apresiasi terhadap Brimob mengalami pasang surut sejak pembentukannya pada 14 November 1945. Di masa lalu Brimob bahkan pernah hanya dijadikan 'serep' dan terkadang 'tameng' bagi salah satu kesatuan di TNI pada saat operasi pemadaman pemberontakan. akan tetapi, seiring dengan penguatan kelembagaan Brimob dan makin tingginya intensitas ancaman Kamtibmas, Brimob menjadi salah satu unit yang langsung bertanggung jawab kepada Kapolri. Namun demikian, setelah ancaman terror membutuhkan kesatuan khusus di luar yang telah ada, Brimob kembali mengalami ujian. Korps Baret Biru

* Pernah dimuat dalam H.U. Jurnal Nasional, Jakarta, 15 November 2008.

tersebut harus membuktikan kegemilangan peran dan fungsinya di mata masyarakat sebagaimana yang dilakukan dimasa lalu. Hal yang makin menyurutkan posisi Brimob adalah serangkaian tindak kekerasan yang dilakukan oleh Brimob di daerah konflik, yang dianggap tidak memperhatikan HAM. Bahkan secara tegas Amerika Serikat (AS) dan Australia yang membantu pengembangan pasukan anti terror, Densus 88 AT mensyaratkan agar anggota Densus 88 AT tidak diambil dari anggota Brimob yang pernah ditugaskan di daerah konflik, khususnya Aceh dan Papua.

Mau Kemana?

Harus diakui bahwa keberadaan Brimob Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelahiran Polri. Bahkan secara legal-formal, pembentukan Brimob lebih dulu dari pada induk organisasinya. Hal ini merupakan bagian dari penghargaan bahwa Brimob merupakan unit pelopor yang berjuang dan mengilhami pembentukan unit-unit lainnya yang ada di lingkungan Polri.

Bila pada awal reformasi, Brimob disetarakan dengan tentara yang melanggengkan penggunaan kekerasan, namun setelah sepuluh tahun reformasi, Brimob dihadapkan pada dua pilihan yang menyulitkan; mengembangkan organisasi dengan peningkatan kualitas SDM atau stagnan dan tergerus oleh dinamika yang terjadi di internal Polri. Pilihan menyulitkan tersebut dikarenakan kedua-duanya mengandung konsekuensi yang sama-sama berat. Pengembangan organisasi dan peningkatan kualitas SDM membutuhkan dukungan dan kebijakan pimpinan Polri yang konsisten dan bervisi ke depan. Di samping itu, mengembangkan organisasi Brimob juga berkonsekuensi pada anggaran yang tidak sedikit. Sementara itu stagnasi Brimob sama saja dengan mengabaikan cita-cita pendiri Brimob. Hal yang mana sama sulitnya untuk dilakukan oleh pimpinan Brimob.

Akan tetapi, dinamika ancaman Kamtibmas dengan intensitas tinggi adalah alasan bagi Brimob untuk memilih mengembangkan organisasi dengan peningkatan kualitas SDM-nya. Pengembangan organisasi dan SDM Brimob setidaknya meliputi, yakni: Pertama, mempertegas status Brimob sebagai unit paramiliter yang berada di bawah Polri. Konsekuensi dari posisi ini Brimob harus pula mengadopsi pendekatan kepolisian dalam tingkatan operasionalnya. Dengan kata lain, Brimob harus secara terbuka menerima masukan terkait dengan karakteristik masyarakat dalam Perpolisian Masyarakat (Polmas), serta penghargaan terhadap HAM, sebagai parameter dari perpolisian demokratik. Sementara di sisi yang lain, pimpinan Polri juga harus benar-benar memperhatikan esensi integralitas Brimob ke dalam Polri. Dengan kata lain, Brimob tidak lagi sekedar ada, tapi diperhatikan segala kebutuhannya.

Kedua, peningkatan kualitas SDM dengan memperhatikan kesejahteraan anggota. Hal ini perlu digaribawahi agar sebagai anggota unit khusus, anggota Brimob tidak perlu dipusingkan dengan urusan domestik, semisal biaya sekolah anak atau pemenuhan kebutuhan pokok lainnya. Dengan begitu anggota Brimob dengan kemampuan khusus dapat secara fokus menjalankan peran dan fungsinya secara optimal.

Ketiga, perluasan wewenang dan cakupan tugas bagi Brimob, dengan menambahkan dua tugas yakni: penjagaan perbatasan antar negara dan pengamanan perairan. Penjagaan perbatasan ini diasumsikan sebagai bagian integral untuk mengisi zona abu-abu diantara tugas dan wewenang TNI dan Polri. Sebab, secara organisatoris juga TNI telah lama menjalankan perannya di wilayah abu-abu tersebut dengan komando teritorialnya. sementara itu terkait dengan pengamanan perairan untuk mempertegas fungsi pengamanan perairan yang dilakukan oleh Polair. Bila memungkinkan akan dilikuidasi ke dalam Brimob. Sehingga efektifitas kontrol kinerjanya akan menjadi lebih baik.

Keempat, perluasan tugas ini mengandung konsekuensi dengan penambahan jumlah anggota Brimob. Bila memungkinkan pada 15 hingga 20 tahun yang akan datang jumlah anggota Brimob berkisar sekitar 100 ribu personil atau seperenam dari jumlah anggota Polri, yang diperkirakan berjumlah sekitar 600 ribu pada tahun 2025. Jumlah tersebut diharapkan dapat menjawab tantangan Kamtibmas dan Kamdagri secara integral dan komprehensif.

Dengan memperhatikan beberapa hal tersebut di atas, Brimob harus terus melangkah dinamis agar menjadi unit yang tidak hanya menjadi kebanggaan internal Polri, tapi juga menjadi kebanggaan bangsa ini. Karena itu kebanggaan terhadap Korps Baret Biru juga harus diiringi komitmen pimpinan Polri untuk mengembangkan unit paramiliter tersebut. Sebab tanpa itu, kebanggaan yang tertanam pada segenap anggota Brimob akan cenderung bersifat semu. *Dirgahayu Brimob Polri ke 63!!*